ISLAMIA
JURNAL PEMIKIRAN ISLAM **REPUBLIKA**

Halaman ini terselenggara atas kerja sama Republika dengan INSISTS





Riyan Nuryadin
Alumnus S-2 Pendidikan Islam, Universitas Ibn Khaldun Bogor

Pendidikan MULTIKULTURALISME PERSPEKTIF ISLAM

Islam adalah agama yang mengatasi dan melintasi waktu karena sistem nilai yang dikandungnya adalah mutlak.

Pembumian wacana multikulturalisme pada ranah pendidikan formal (sekolah) dewasa ini semakin menggeliat. Maraknya gagasan multikulturalisme disertai dengan penyebaran isu pendahuluan: banyaknya peristiwa bentrokan dan konflik horizontal di tengah masyarakat. Berbagai pihak kemudian menyuarakan gagasan ini lebih keras dan diimplementasikan lebih dini dalam kurikulum pendidikan.

Lebih jauh lagi, kini paham multikulturalisme mulai diintegrasikan pada ranah pendidikan agama. Alasannya, seperti dikemukakan dalam buku *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi,* pendidikan agama Islam yang ada saat ini dianggap sudah tidak relevan dan telah gagal menciptakan harmoni kehidupan dan bahkan menjadi pemicu konflik di tengah masyarakat plural (Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, 2008:15).

Kementerian Agama RI pun telah menerbitkan sebuah buku berjudul *Panduan Integrasi Nilai Multikultur dalam Pendidikan Agama Islam pada SMA dan SMK*—selanjutnya disingkat *Panduan Integrasi* (diterbitkan dengan kerja sama dengan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII), TIFA Foundation, dan Yayasan Rahima).

Jika ditelisik lebih jauh, penanaman paham multikulturalisme—apalagi dalam ranah Pendidikan Agama Islam—sebenarnya belum didasari oleh kajian dan penelitian yang mendalam. Sebab, dalam perspektif Islam, paham multikulturalisme itu perlu ditelaah secara kritis. Berikut ini sejumlah catatan kritis atas multikulturalisme:

Pertama, persoalan makna istilah. Multikulturalisme memiliki rentang definisi yang beragam, mulai dari sekadar pengakuan terhadap realitas multikultural masyarakat dunia saat ini; upaya untuk menerima dan menghormati realitas itu; hingga pada pengertian yang merefleksikan relativisme kebenaran dan relativisme agama. Kecenderungan dominan dalam beberapa buku, semisal buku berjudul *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, istilah ini merefleksikan relativisme kebenaran dan agama. Ini karena, multikulturalisme hakikatnya merupakan kelanjutan dari paham inklusivisme dan pluralisme agama (Baidhawy, 2005:69 & 117).

Jika pada inklusivisme, integritas agama tertentu masih dipertahankan sekalipun ada pengakuan kebenaran pada yang lain, maka multikulturalisme dalam makna ini bergerak lebih jauh lagi: memungkinkan berbagi agama dengan yang lain. Dalam ide ini terkandung muatan sinkretisme agama. Bahkan, bukan tidak mungkin, memunculkan agama baru bernama multikulturalisme.

Kedua, kekeliruan memahami agama Islam. Konsep multikulturalisme mendudukkan Islam sebagai agama yang sama dan sederajat dengan agama yang lain. Padahal, Islam sebagai agama (*ad-din*) berbeda dengan agama-agama yang ada di dunia ini. Islam adalah satu-satunya agama wahyu yang sampai sekarang orisinalitasnya terjaga. Dalam istilah Prof Naquib al-Attas, "*Islam is the only genuine revealed religion.*" (al-Attas, *Prolegomena to the Metaphysic of Islam*).

Islam bukan agama budaya dan bukan agama yang dihasilkan oleh proses evolusi budaya. Demikian pula sistem nilai dan sistem pemikiran Islam bukan semata berasal dari unsur-unsur budaya dan folosofis yang dibantu sains, melainkan berasal dari sumbernya yang asli, yaitu wahyu dikonfirmasi oleh agama serta didukung oleh akal dan intuisi. Islam sebagai agama final dan matang dari sejak diturunkannya tidak mengenal adanya proses penyempurnaan. Islam berbeda dengan agama-agama lainnya—terutama agama bumi—di dunia ini yang lahir dari sebuah evolusi. Sehingga, ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh Allah dan RasulNya adalah ketentuan final sebagai syariat hidup manusia menjalani penghambaan dan pengabdiannya kepada sang khalik. Sebagaimana tercantum dalam surat al-Maidah (5) ayat 3. Sementara, agama lain hanyalah berupa pengalaman spiritual seseorang atau sekelompok orang dalam mencari sisi-sisi transenden untuk melengkapi kekosongan nilai spiritual yang ada dalam dirinya.

Islam juga bukan agama sejarah (*historical religion*). Islam adalah agama yang mengatasi dan melintasi waktu karena sistem nilai yang dikandungnya adalah mutlak. Kebenaran nilai Islam bukan hanya untuk masa dahulu, melainkan juga sekarang dan akan datang. Nilai-nilai yang terdapat dalam Islam berlaku sepanjang masa. Islam memiliki pandangan alam mutlaknya sendiri yang berbeda dengan agama lain. Pandangan alam (*worldview*) ini meliputi persoalan ketuhanan, kenabian, kebenaran, alam semesta, dan lain sebagainya.

Ketiga, kekeliruan memahami konsep-konsep penting dalam agama. Pemahaman keliru ini berimbas pada sikap yang tidak tepat dalam mengatasi berbagai problem di masyarakat terkait kehidupan beragama. Konsep-konsep yang dipahami keliru itu, seperti konsep Tuhan, konsep wahyu (alquran dan hadis), konsep *truth claim* (klaim kebenaran agama), toleransi, agama sama dengan budaya, *kalimatun sawa*, dakwah Islamiah, dan lain sebagainya.

Sebagai contoh, dalam pemahaman multikulturalisme, klaim kebenaran (*truth claim*) tidak boleh lagi digaungkan. Mereka beralasan bahwa klaim kebenaran merupakan puncak dari semangat egosentrisme, etnosentrisme, dan chauvinisme. Klaim kebenaran bagi paham ini dianggap sebagai kelainan jiwa yang disebut *narsisme* (sikap membanggakan dan mengunggulkan diri). Sikap klaim kebenaran inilah yang menurut kalangan penggagas pendidikan multikulturalisme ini yang akan menghasilkan friksi di masyarakat dan menimbulkan konflik (Choirul Mahfud, 2009: 9).

Padahal, dalam Islam, mengakui dan meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan mempersaksikan keyakinan tersebut di hadapan Allah SWT juga di hadapan manusia lainnya adalah keniscayaan yang harus dilakukan. Selain sebagai bagian dari deklarasi kemusliman serta kesiapan untuk tunduk dan patuh, persaksian tersebut menjadi media dakwah pada manusia yang lain untuk sama-sama beriman dan berislam. Islam mengajarkan prinsip hidup toleran tanpa harus meniadakan kebenaran prinsip yang dipegang. Toleransi dalam Islam bukan berarti sepakat, setuju, membenarkan ajaran agama lain, melainkan menghormati pemeluk dan ajaran agama lain sesuai proporsinya. Proses saling menghargai dan menghormati ini dilakukan sambil menegakkan prinsip ajaran agama, nilai-nilai agama, dan kewajiban berdakwah dalam bingkai-bingkai yang dianjurkan oleh agama itu sendiri.

Keempat, kekeliruan memahami budaya dan kesederajatan. Konsep multikulturalisme tidak dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman suku bangsa atau kebudayaan yang menjadi ciri masyarakat majemuk (*plural society*). Karena, multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan (Choirul Mahfud, 2009: 95).

Pemahaman seperti ini mengharuskan masing-masing budaya manusia atau kelompok etnis diposisikan sejajar dan setara. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih dominan. Karena, semua kebudayaan pada dasarnya mempunyai kearifan tradisional yang berbeda-beda. Kearifan-kearifan (baca: ajaran, nilai-nilai, kandungan, dan lain-lain) tersebut tidak dapat dinilai sebagai positif-negatif dan tidak dapat dijelaskan melalui kacamata kebudayaan yang lain. Hal ini disebabkan oleh sudut pandang dan akar baik-buruk dari setiap kebudayaan mempunyai volume yang berbeda pula.

Budaya versi kalangan ini tidak terbatas dalam bidang seni, tetapi mencakup segala hal yang menjadi proses dan produk sebuah komunitas, meliputi agama, ideologi, sistem hukum, sistem pembangunan, dan sebagainya (Choirul Mahfud, 2009:205). Kalangan multikulturalis memaknai budaya secara luas, bahkan termasuk agama di dalamnya.

Maka, agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Jawa, Sunda, Batak, kapitalisme, sosialisme, dan berbagai produk komunitas lainnya adalah budaya dan posisinya sejajar dan sederajat. Islam tidak dapat menyalahkan agama lain, tidak dapat menilai baik atau buruk agama lain karena posisinya sama. Begitu pula, Islam tidak boleh mengklaim sebagai satu-satunya agama yang benar di sisi Tuhan karena hal demikian akan mencederai semangat toleransi dalam bingkai multikulturalisme.

Paham ini tidak membedakan antara budaya baik dan budaya buruk karena semuanya dalam bingkai kesederajatan. Sementara, agama Islam tidaklah demikian. Islam memandang tinggi budaya baik dan memandang rendah budaya buruk. Jadi, dalam Islam, persoalan budaya pun tetap dibingkai oleh nilai-nilai Ilahi yang sifatnya mutlak dan harus menjadi pedoman untuk menakar kualitas budaya individu maupun kelompok.

Bahaya lebih jauh adalah persepsi bahwa budaya bukanlah suatu kemutlakan yang harus dipertahankan, termasuk agama di dalamnya. Budaya dipahami sebagai sebuah gerak (*move*) kreativitas masyarakat yang dibangun oleh gerakan prinsip-prinsip yang berbeda yang kemudian membentuk sebuah kesepakatan bersama tentang nilai, pandangan, dan sikap masyarakat (*reinventing*). Dalam arti, budaya tumbuh dan berkembang seiring dengan berkembangnya masyarakat itu sendiri yang tentunya dipengaruhi oleh faktor ekstern yang mengelilingi kehidupannya (Wahid, 2001:77).

Jika pemahaman ini diaplikasikan maka yang terjadi adalah agama dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya bukanlah sesuatu yang mutlak dan final. Nilai-nilai atau kandungannya akan dan harus selalu berevolusi seiring sejalan dengan evolusi masyarakat yang berbeda dari waktu ke waktu. Jika demikian yang terjadi, sendi-sendi ajaran agama, khususnya Islam, lambat laun akan hilang dan punah. Terganti oleh nilai-nilai kreatif buatan manusia yang justru akan membahayakan eksistensi kemanusiaannya itu sendiri dan eksistensi kehidupan secara keseluruhan.

Kelima, agenda buruk globalisasi. Pendidikan multikulturalisme dalam ranah agama patut diduga merupakan agen taktis untuk memuluskan penjajahan nilai-nilai sekuler-liberal pada era globalisasi. Nilai-nilai sekuler-liberal dapat mengikis dan menghancurkan pemikiran dan keimanan umat Islam. Globalisasi bukan hanya melahirkan penjajahan ekonomi, melainkan juga penjajahan pemikiran, budaya, nilai, dan tradisi. ■

Equal Opportunity

Gagasan multikulturalisme ini dengan tegas menyatakan bahwa negara sekuler-liberal merupakan jawaban atas keberagaman agama seperti yang terdapat di Indonesia. Yang demikian karena, menurut mereka, negara sekuler-liberal posisinya netral dan mampu memberikan *equal opportunity* kepada keanekaragaman agama.

Pendidikan multikulturalisme dalam ranah agama dapat mengikis keyakinan beragama umat Islam yang benar yang bersumber dari alquran dan as-sunah. Keyakinan tersebut diubah dengan pemahaman keagamaan yang semata-mata rasional, memenuhi dimensi sosiologis dan antropologis manusia semata. Maka, ketika proses ini berhasil dijalankan, akan memudahkan kalangan sekuler-liberal untuk melanjutkan cengkeraman penjajahan peradabannya kepada negeri-negeri Muslim.

Jika konsep pendidikan multikulturalisme seperti hasil temuan penulis yang diutarakan di atas maka pendidikan ini akan sangat berbahaya bagi siswa didik Muslim. Dengan paham semacam ini, peserta didik dijauhkan dari tujuan pendidikan itu sendiri. Pendidikan agama Islam sejatinya adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Alquran dan al-hadis, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran latihan, serta penggunaan pengalaman (Ramayulis, 2010: 21).

Pendidikan agama dalam Islam adalah pendidikan agama yang berbasis *tauhidullah* dilandasi oleh semangat beribadah dan semangat dakwah dalam setiap dimensi kehidupan manusia. Dalam Islam, seluruh perbuatan manusia, termasuk pendidikan, dibingkai oleh motivasi penyerahan total dirinya sebagai hamba Allah dan *khalifatullah.* Inilah hakikat pendidikan dalam pandangan alam Islami yang perlu diejawantahkan dalam dunia pendidikan dewasa ini.

Secara konseptual dan fakta sejarah, tauhid Islam senantiasa bersinergi dengan kerukunan. Karena itu—berbeda dengan kondisi di dunia Barat—wacana multikulturalisme tidak menduduki tempat penting. Maka, seyogianya, para cendekiawan Muslim tidak mudah hanyut dalam gegap gempita paham-paham baru yang dapat berdampak negatif pada pemahaman Islam yang benar. *Wallahu'alam bish shawab.* ■


montana_edu

paulsterry83



MULTIKULTURALISME di Barat

sikap intoleran ini bisa berkembang menjadi rasisme dan xenofobia.



Heru Susetyo
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Indonesia

Dunia Barat—apakah Eropa ataupun Amerika Utara dan Australia—adalah contoh paradoks multikulturalisme. Ide-ide tentang kebebasan, persamaan, dan hak asasi manusia tumbuh dan berkembang di sana. Bahkan, beberapa abad lamanya Eropa Barat dan Amerika Utara menjadi rujukan utama untuk belajar kebebasan, persamaan, HAM, dan demokratisasi.

Namun, di dunia Barat pula sikap-sikap intoleran terhadap kultur, ras, etnis, dan bangsa lain tetap tumbuh subur. Masih banyak penduduk Barat yang berkehendak negerinya cukup dihuni oleh satu etnis saja. Satu identitas kultur yang bersifat homogen. Bukan untuk pendatang berkulit berwarna, apalagi imigran Muslim.

Pada tataran tertentu, sikap intoleran ini bisa berkembang menjadi rasisme dan xenofobia. Ketakutan berlebihan terhadap orang-orang asing atau yang dianggap berbeda dari *mainstream*. Geert Wilders, anggota parlemen Netherlands yang membuat film *Fitna* pada 2008 yang sarat dengan kebencian terhadap Islam dan imigran Muslim adalah contoh ekstremnya. Geert menyamakan Alquran dengan *Mein Kampf*, 'kitab suci'-nya Hitler. Ia menolak rencana pembangunan masjid-masjid baru di Netherlands, aktif berkampanye menentang masuknya imigran Muslim ke Netherlands atas nama "Anti-Islamisasi Netherlands".

Jangan lupakan juga kasus Marwa El Sherbini. Muslimah Mesir yang tinggal di Dresden, Jerman, ini dibunuh oleh seorang xenofobis lain, Alex Wiens, warga negara Jerman keturunan Russia, persis di dalam ruang pengadilan Dresden pada 1 Juli 2009. Ia ditikam 15 kali dan suaminya 16 kali. Marwa menjemput syahidnya dan suaminya koma selama dua hari, namun tetap hidup. Parahnya, pada saat kejadian Marwa tengah hamil tiga bulan dan penikaman dilakukan persis di depan anaknya yang berusia tiga tahun. Tak cukup itu, polisi Dresden kemudian justru menembak Suami Marwa, Okaz, yang melawan serangan Alex hingga ikut ditikam berkali-kali. Okaz dianggap pelaku oleh polisi dan ditembak kakinya.

Peristiwa ini memancing kemarahan besar dari kaum Muslim Eropa dan dunia. Marwa kemudian disebut sebagai *martyr of hijab*. Sebab, serangan Alex kepada Marwa bermula dari hinaan verbalnya kepada Marwa di suatu taman bermain anak di Dresden pada Agustus 2008. Pertengkaran akibat berebut fasilitas bermain anak antara Alex dan Marwa berujung dengan hinaan Alex yang menyebut Marwa sebagai "*Islamist*", "*terroris*", dan "*slut*" (pelacur). Marwa melaporkan Alex kepada polisi hingga akhirnya ia disidangkan di pengadilan. Namun, pengadilan ternyata bukan tempat yang aman. Alex tetap bisa membawa pisau dan menikam Marwa dan suaminya di dalam pengadilan.

Pada level komunal, gejala ketidaktoleranan terhadap kultur lain dapat dilihat di Belgia. Negeri kecil Belgia dengan luas wilayah tak lebih luas dari Jawa Barat sudah beberapa lama terbelah. Antara bagian utara yang berbahasa Belanda (Vlaamatau Flemish) dan bagian selatan yang berbahasa Prancis (Wallonia). Antara 2010–2011, sekitar 541 hari Belgia tak memiliki pemerintahan. Karena, dua partai dengan suara terbanyak dari dua bagian negara yang berbeda selalu tak memiliki kesepakatan untuk membentuk pemerintahan. Kecurigaan dan prasangka antarpenduduk maupun kelompok politik berbeda bahasa terus berkembang. Padahal, total penduduk Belgia hanya 11 juta jiwa.

Negeri Spanyol setali tiga uang. Negeri sepak bola tersohor sejagat ini tak sepenuhnya damai. Masih ada riak-riak ketidakpuasan terhadap Pemerintahan Madrid. Daerah Catalan di sisi Tenggara Spanyol dan Basque di Utara selalu menuntut otonomi hingga pemisahan diri dari pemerintah pusat di Madrid. Sentimen ini berkembang hingga ke jagad sepak bola. Kompetisi antara dua raksasa sepak bola Spanyol (bahkan dunia), Real Madrid dan Barcelona, tak sepenuhnya kompetisi olah raga murni. Karena, Real Madrid bercokol di Madrid dan secara historis adalah representasi otoritarianisme Madrid. Sementara, Barcelona bercokol di Kota Barcelona yang merupakan kota terbesar di daerah Catalan. Daerah tersebut secara historis memiliki keengganan untuk bergabung dengan Federasi Spanyol di Madrid. Laga sepak bola antara kedua jawara ini selalu diwarnai dengan celotehan bernada fanatisme, kebencian (*hate crimes*), hingga separatisme. *Sport is not just sport*.

Masih di jagad bola. Tak sekadar menjadi tontonan paling menarik sejagad. Sepak bola Eropa adalah juga pentas fanatisme berlebihan yang tak jarang berbuah pada rasisme dan penghinaan. Pemain sepak bola berkulit hitam dan yang berasal dari negeri Muslim acap kali mendapat hinaan. Dari sesama pemain, pelatih, maupun penonton dan media massa. Samuel Eto'o, pesepak bola Barcelona berkulit hitam diteriaki sebagai "monyet" dan dilempari kacang ketika ia menguasai bola oleh fans dari Real Zaragoza pada Februari 2005. Patrice Evra, pesepak bola Manchester United berkulit hitam, dihina oleh pemain Liverpool, Luis Suarez, pada 15 Oktober 2011. Berulang kali Suarez menghina Evra dengan mengatakan "negro", "saya tak mau bicara dengan negro", dan lain-lain. Hinaan tersebut berujung pada dilarangnya Suarez bermain di delapan pertandingan plus didenda 40.000 poundsterling.

Tak hanya individu dan masyarakat umum, negara pun bisa mendukung sikap tidak toleran dan anti-multikulturalisme. Masih ingat dalam benak kita betapa pemerintah dan parlemen Prancis meloloskan begitu saja undang-undang yang melarang penggunaan dan penampakan simbol-simbol agama, seperti jilbab bagi Muslimah, *kippa* bagi Yahudi, dan kalung salib bagi Kristiani di sekolah-sekolah publik pada Maret 2004. Kebijakan ini adalah atas nama melindungi sekularisme Prancis dan menjaga "netralitas" lembaga publik dari simbol-simbol agama. Itu berlaku buat para siswa, guru maupun, tenaga administrasi. Dan, bisa diduga, korban-korban pun bermunculan. Sejumlah siswi Muslimah jadi subjek diskriminasi di sekolah publik hanya karena memilih berhijab.

Tak cukup itu, apabila pelarangan hijab hanya berlaku di sekolah publik maka pada September 2010 parlemen Prancis mengesahkan UU yang melarang penggunaan burqa (cadar/penutup wajah) di seantero Prancis. Pengambilan keputusan di parlemen sangat dramatis. Di mana hanya satu suara menolak, sementara 246 suara lainnya setuju pelarangan burqa. Kenyataan ini sangat ironis. Mengingat, di Prancis ada beberapa tempat yang legal sebagai *nudist beach* (pantai di mana orang bebas bertelanjang ria), sementara mereka yang berburqa malah dilarang dan yang berjilbab dibatasi. Jadi, benarkah dunia Barat penuh dengan toleransi dan penghargaan terhadap multikulturalisme? ■

Masih Percaya Multikulturalisme?



Dr Adian Husaini
Dosen Pascasarjana
Universitas Ibn Khaldun
Bogor

Renungkanlah sebuah definisi "multikulturalisme" berikut ini: "Inti dan substansi dari multikultural adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa mempedulikan perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa, atau pun agama. Apabila pluralitas sekadar merepresentasikan adanya kemajemukan, multikultural memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di dalam ruang publik." (Dari buku *Panduan Integrasi Nilai Multikultur dalam Pendidikan Agama Islam pada SMA dan SMK*, terbitan Kementerian Agama RI, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII), TIFA Foundation dan Yayasan Rahima).

Merujuk pada definisi itu, seorang baru berhak mendapat julukan "berwawasan multikultural" jika dia mau menerima orang atau kelompok lain yang mempunyai hak yang sama di ruang publik. Siapa pun orang atau kelompok itu, tanpa peduli apa pun budayanya, etnisnya, gendernya, ataupun agamanya. Memang, berbagai literatur menjelaskan, multikulturalisme bukan hanya mengakui adanya keragaman, tetapi juga harus mau mengakui "kesederajatan" di antara budaya dan agama apa pun!

Dengan definisi semacam ini, multikulturalisme sedang mendorong seorang Muslim untuk melepas wawasan keimanannya. Muslim dijerat untuk berpikir bahwa tiada beda antara tauhid dan syirik. Agama diletakkan dalam ranah pribadi. Di ranah publik, semua harus diperlakukan sama. Jangan peduli, apakah agama dan budaya itu sesat atau bejat. Yang penting agama, yang penting budaya! Kata mereka, negara tidak berurusan dengan soal kebenaran atau kesesatan. Negara harus bersikap netral!

Mungkinkah multikulturalisme dengan makna seperti itu diterapkan? Pada 17 Oktober 2010, Kanselir Jerman Angela Markel menyatakan bahwa multikultutalisme telah gagal. Markel menyatakan, adalah ilusi bahwa orang Jerman dan pekerja asing bisa hidup berdampingan secara damai. Kata Markel, "*it had been an illusion to think that Germans and foreign workers could live happily side by side.*" Meskipun Markel mengakui bahwa Jerman terbuka untuk imigran, tetapi posisinya sejalan dengan Horst Seehofer, yang satu pekan sebelumnya menyerukan agar Jerman menyetop imigran dari Turki dan Arab. Bahkan, Seehofer menyatakan, "*Multiculturalism is dead.*" (*http://www.guardian.co.uk/world/2010/oct/17/angela-merkel-germany-multiculturalism-failures*).

Pada 5 Februari 2011, *BBC* London juga menyiarkan pidato PM Inggris David Cameron yang menyatakan bahwa multikulturalisme telah gagal. "*State multiculturalism has failed*," kata Cameron. Lebih lanjut Cameron berujar, "*Frankly, we need a lot less of the passive tolerance of recent years and much more active, muscular liberalism.*" (http://www.-bbc.co.uk/-news/uk-politics-12371994)



Kedua pemimpin Eropa itu sedang bicara fakta. Bahwa, memang, di Eropa posisi Muslim tidak sama dengan posisi kaum mayoritas di sana. Lihat saja posisi-posisi strategis dalam pemerintahan! Apakah Muslim juga mendapatkan hak yang sama dengan agama mayoritas?

Bagi kaum sekuler—yang membuang nilai-nilai agamanya sendiri dalam memandang perbedaan sosial—tak ada beda antara syirik dan tauhid, tiada beda antara benar dan salah. Yang penting, persepsi dan nilai-nilai pribadi jangan dibawa ke ruang publik.

Perspektif sekular semacam itu, tentu sangat sulit diterima seorang Muslim. Sebab, Muslim selalu berusaha "bersama Islam" dalam sikap dan dalam pikiran. Akan sangat aneh jika seorang pejabat Muslim mengatakan dua hal berbeda seputar masalah pokok keagamaan hanya karena tempatnya berubah. Andaikan saat berada di masjid seorang presiden—dia Muslim—ditanya, "Apakah Ahmadiyah sesat?"

Karena sedang berada di masjid maka dengan tegas dia menjawab, "Ya sesat!" Usai shalat, presiden kembali ke Istana. Lalu, dia ditanya hal yang sama, "Apakah Ahmadiyah sesat?" Karena sedang di Istana, sang presiden menjawab, "Maaf saya sedang di Istana. Jadi, saya tidak bisa mengatakan, sesat atau tidak karena saya harus bersikap netral!"

Ironisnya, di Indonesia, penyebaran paham muiltikulturalisme ini berlangsung sangat liar, nyaris tanpa kendali akademis. Keragaman makna begitu besar. Pada 2009, sang profesor di sebuah perguruan tinggi di Malang menyampaikan pidato pengukuhan guru besarnya dengan judul *Silang Sengkarut Agama di Ranah Sosial*.

Sang profesor mengajukan gagasan perlunya pengembangan studi agama berbasis paham multikulturalisme dan kesatuan transendensi agama-agama. Ia menulis, "Semua agama, apa pun bentuk eksoteriknya (tata cara beribadah, tempat ibadah, ungkapan-ungkapan bahasa agama, dan perbedaan bersifat simbolik lainnya), kata Frithjop Schuon, berjumpa pada ranah transendental, yaitu Tuhan. Inilah dimensi esoteris agama, sekaligus jantung semua agama (*The Heart of Religion*)." (hal 46).

Jelas, gagasan transendentalisme semacam itu tidak sesuai dengan Islam yang menggariskan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW diutus maka syariat yang berlaku bagi umat manusia adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Jika semua cara menyembah Allah SWT dibenarkan, lalu untuk apa Nabi Muhammad SAW diutus?

Contoh lain lagi, sebuah buku berjudul *Pluralisme dan Multikulturalisme, Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia* (2011). Buku ini diberi kata "pengantar ahli" oleh seorang guru besar pendidikan Islam. Sang guru besar menulis, "Saat ini sudah 'mendesak sekali membumikan' pendidikan Islam berwawasan pluralisme dan multikulturalisme. Kesadaran akan pentingnya pluralisme dan multikulturalisme dipandang menjadi perekat baru integrasi bangsa yang sekian lama tercabik-cabik." (hal xiv).

Jika kita renungkan, penggunaan istilah "multikulturalisme sebagai paradigma baru pendidikan Islam" itu pun sebenarnya sudah bermasalah. Jika multikulturalisme adalah konsep yang baik sejak dulu, mengapa baru sekarang dijadikan paradigma bagi pendidikan agama Islam? Apakah pendidikan agama Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW tidak berbasis multikulturalisme? Selama ratusan tahun pesantren telah berdiri di Indonesia, apakah mereka tidak berwawasan multikultural? Mana yang tepat: pendidikan Islam berbasis multikulturalisme atau pendidikan Islam berbasis tauhid? Sebagai Muslim, kita pasti lebih memilih Tauhid! *Wallahu a'lam bish shawab.* ■

MULTIKULTURALISME DAN ALIENISASI ISLAM


fineartamerica

Orientalis dan misionaris kolonial melakukan proses disintegrasi kebudayaan untuk melawan fenomena ini.



Arif Wibowo
Peneliti Pusat Studi Peradaban Islam, Solo

Multikulturalisme menurut Rogers dan Steinfatt merupakan pengakuan bahwa beberapa kultur yang berbeda dapat eksis dalam lingkungan yang sama dan menguntungkan satu sama lain atau pengakuan dan promosi terhadap pluralisme kultural (Everett M Rongers, Thomas M Steinfatt, *Intercultural Communication,* (Illinois: Waveland Press, Inc, 1999:238).

Multikulturalisme tidak sekadar pengakuan adanya pluralitas dalam masyarakat, namun juga memberikan penegasan bahwa segala perbedaannya mempunyai hak sama di ruang publik. Maka, semua komunitas harus diperlakukan sama oleh negara.

Realitas kemajemukan Indonesia, yang terdiri atas 13.667 pulau, 358 suku bangsa, dengan berbagai agama yang dipeluk, yakni Islam 88,1%, Kristen dan Katolik 7,89%, Hindu 2,5%, Buddha 1%, dan yang lain 1% (Soetapa, 1991: 1-2) menjadi argumen utama bagi para pengusung multikulturalisme untuk mendesakkan konsep ini dalam sistem pendidikan dan arah pengambilan kebijakan di Indonesia. Dari kalangan agama, pihak Kristen termasuk pihak yang gencar mengampanyekan konsep multikuturalisme ini. Salah satu alasan yang sering dikemukakan adalah terpinggirkannya agama-agama asli yang selama ini justru tidak diakui sebagai agama resmi. (Huub J W M Boelaars, Dr OFM Cap, *Indonesianisasi Gereja Katolik: Dari Gereja Katolik di Indonesia Menjadi Gereja Katolik Indonesia,* (Yogyakarta: Kanisius, 2005:57).

Kultur pra-Islam

Dalam perjalanan dakwah Islam di kepulauan nusantara, seiring dengan terjadinya konversi keagamaan massal penduduknya. Secara perlahan, terjadi proses integrasi Islam ke semua sisi identitas kultural masyarakat. Nilai-nilai masyarakat lokal ditampung, *ditampih*, dan disaring lebih dulu untuk kemudian diserap (Syamsuddin Arief, *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*, 2008:238).

Proses Islamisasi kebudayaan ini telah menjadikan Islam sebagai konsep dasar hampir semua kebudayaan suku di Indonesia yang telah memeluk Islam. Kuatnya identitas Islam merupakan rintangan utama bagi penginjilan di Indonesia pada masa kolonialisme. Hendrik Kreamer menggambarkan kesulitan ini sebagai berikut, "Islam sebagai problem dari misi, tidak ada agama selain Islam yang untuknya misi bekerja banting tulang tanpa hasil dan padanya misi menggarukkan jarinya sampai berdarah dan koyak." (Kareel Steenbrink, *Kawan Dalam Pertikaian, Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1596 – 1942),* 1995:164).

Setelah strategi penginjilan langsung kepada kaum Muslimin tidak berhasil maka dilakukan proses pelemahan secara tidak langsung. Cara untuk mengurangi kekuatan Islam itu adalah dengan jalan mempromosikan kebiasaan rakyat kuno, adat dan agama rakyat (pra-Islam), sampai pada modernisasi perawatan kesehatan dan pendidikan (Steenbrink, 1995:144).

Pada 1830, Pemerintah kolonial Belanda mendirikan *Instituut voor het Javaansche Taal* (Lembaga Bahasa Jawa) di Surakarta yang merupakan tempat berkumpul para ahli-ahli Jawa berkebangsaan Belanda. Para Javanolog Belanda ini lebih jauh menggali kesusastraan, bahasa, dan sejarah Jawa kuno yang telah lama menghilang di kalangan orang Jawa. Mereka berusaha mengembalikan tradisi Jawa kuno (Jawa pra-Islam) dan menghubungkannya dengan Surakarta. Javanolog Belandalah yang "menemukan", "mengembalikan" dan "memberikan makna terhadap Jawa masa lalu. Jika orang Jawa ingin kembali ke masa lalunya, mereka harus melalui *screening* pemikiran Javanolog Belanda (Takashi Shiraisi, *Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926,* 1997:7).

Salah satu produk utamanya adalah munculnya *kejawen*, yang bisa dikatakan sebagai bid'ah kebudayaan Jawa. Sebab, pada kenyataannya, mistisisme Jawa yang bercorak sinkretis dan berbasis Hindhu Buddha hanyalah eksklusif budaya keraton, bukan milik masyarakat Jawa dalam konteks yang luas (Andrey Moller, *Ramadhan di Jawa, Pandangan dari Luar,* 2005:3).

Namun, konsep ini kemudian dipaksakan menjadi wajah utama masyarakat Jawa dari kalangan abangan. Petrus Joshepus Zoetmulder, Jesuit yang berkarya di Jawa, memberikan landasan akademis bagi kaum kejawen melalui disertasinya yang berjudul *Pantheisme en Monisme In de Javaansche Soeloek-Litteratuur.* Dalam pandangan Zoetmoelder doktrin *manunggaling kawula gusti* sama sekali tidak terkait dengan tasawuf Islam melainkan suatu bentuk pandangan *monistis* yang berasal dari ajaran Atman Hindu (PJ Zoetmulder, *Manunggaling Kawula Gusti, Pantheisme dan Monisme dalam Sastra Suluk Jawa*, 1990: 370).

Padahal, menurut Prof Naquib al-Attas, doktrin Atman yang diinterpretasikan sebagai Brahmana yang terpendam dalam wujud individual (monisme), yang dihadirkan dalam aneka bentuk puisi tidak dimaksudkan untuk telinga-telinga najis orang kebanyakan (Syed Naquib al-Attas, *Dilemma Kaum Muslimin,* 1986:166).

Antara multikulutral dan disintegrasi sosial

Dakwah Islam di kepulauan nusantara telah memberikan identitas baru bagi masyarakatnya yang sebelumnya terpecah menjadi suku-suku kecil untuk bersatu dalam payung besar kebudayaan Melayu. Orientalis dan misionaris kolonial melakukan proses disintegrasi kebudayaan untuk melawan fenomena ini. Di Jawa, Kolese Xaverius, yang digawangi oleh Van Lith, seorang Jesuit yang merupakan perintis penginjilan di Pulau Jawa, melarang pengajaran bahasa Melayu di sekolah guru yang dipimpinnya (Kareel Steenbrink, *Orang-Orang Katolik di Indonesia 1808 – 1942, Pertumbuhan yang Spektakuler dari Minoritas yang Percaya Diri, 903 - 1942*, 2006:636).

Sedikit berbeda, di Kalimantan, para misionaris ini mengonfrontasikan identitas Dayak dengan Melayu. Mereka memberikan pengertian bahwa para sultan Melayu pada masa lampau adalah penjajah masyarakat Dayak. Dan, pertentangan historis antara Melayu dan Dayak ini melahirkan antagonisme sosial di mana orang Dayak yang masuk Islam disebut sebagai masuk Melayu, yang berarti memihak kelompok para penindas mereka dulu (Boelars, 2005:196).

Proses penggalian agama dan kebudayaan asli Indonesia dengan alasan pengembangan multikulturalisme oleh pihak Kristen di Indonesia bisa dilihat sebagai strategi Kristenisasi dalam arti luas.

Menurut Azyumardi Azra, dengan menggali unsur pra-Islam dalam kebudayaan lokal, untuk kemudian memisahkannya secara oposisional, seperti syariat dengan kebatinan, etika Islam dengan etika Jawa, mengikuti argumen William Roff, guru besar Emiritus Columbia University, bukan hanya untuk menjadikan Islam menjadi kabur (*obscure*), tapi juga memberi peluang lebih besar bagi keberhasilan misionaris (Steenbrink, 1995 :xxii).

Dengan demikian, Islam akan menjadi *corpus alienum* (unsur yang terasingkan) dan *negligible majority* (mayoritas yang diabaikan) dalam wacana pembentukan kebudayaan nasional maupun kebudayaan lokal masyarakat Indonesia. Sebuah agenda tersembunyi yang patut dicermati oleh kaum Muslimin di Indonesia. ■

'Toleransi' Walisongo



Tiar Anwar Bachtiar
Mahasiswa Doktoral BAZNAS DDII, Departemen Sejarah Universitas Indonesia

Adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa dielakkan bahwa sejak lama masyarakat Indonesia hidup dengan kultur dan agama yang majemuk, tidak terkecuali saat Islam datang ke negeri ini. Saat itu, agama Hindu-Budha sudah ada lebih dahulu. Dalam proses Islamisasi, sebagian ada yang langsung tertarik untuk memeluk Islam tanpa paksaan, namun sebagian lain masih memegang kepercayaan lama sehingga persentuhan kaum Muslim dengan orang-orang non-Muslim tidak bisa dihindarkan.

Dalam hal ini, ada prinsip-prinsip pokok dipegang secara eksklusif dan tidak bisa ditawar-tawar, yaitu dalam hal akidah dan ibadah. Sementara dalam hal-hal lain, yang tidak berpotensi merusak akidah, ibadah, serta ajaran pokok Islam lainnya, umat Islam bisa menjalin kerja sama dengan siapa saja yang berbeda agama atau budaya.

Contoh menarik bagaimana prinsip-prinsip di atas dijalankan secara sangat baik dapat kita lihat dalam sejarah Walisongo, para pendakwah Islam paling masyhur dan paling berhasil di Tanah Jawa. Para wali ini hidup di akhir zaman Majapahit. Sekalipun sudah banyak yang menganut Islam, namun masih banyak keluarga keraton dan rakyat biasa yang masih belum Muslim. Oleh sebab itu, muamalah dengan non-Muslim tidak bisa dihindarkan.

Salah satu kasus yang penting dicatat adalah saat Walisongo membangun masjid pertama di Demak yang kemudian dikenal sampai hari ini sebagai Masjid Demak. Para arkeolog menyimpulkan bahwa corak Masjid Demak ini masih sangat kental diwarnai gaya arsitektur zaman Hindu. Salah satu cirinya adalah atapnya yang berundak 2-3-5 dan denahnya persegi empat dengan serambi di samping. Model seperti ini mirip dengan seni bangun candi pada masa itu, sekalipun detailnya tetap memperhatikan falsafah Islam dan fungsi masjid itu sendiri bagi umat Islam. Hanya corak dan gayanya yang dipengaruhi Hindu.

Lebih menarik lagi apabila kita telusuri arsitek dan tukang yang membangun masjid ini. Sebagai inisiator dan konseptor masjidnya adalah para Wali. Akan tetapi, implementasi arsitektur dan pengerjaannya dilakukan oleh tukang-tukang dari Majapahit. Dalam *Babad Cirebon* dikisahkan bahwa serambinya sendiri berasal dari Kota Majapahit. Kepala tukang (arsitek) yang membangun Masjid Demak ini pula yang dipercaya oleh Sunan Gunung Djati untuk merancang dan membangun kota di Cirebon saat ia mendirikan Kerajaan Cirebon beberapa tahun setelah berdiri Kerajaan Demak. Dalam *Babad Cirebon* arsitek itu adalah Raden Sepat, seorang arsitek asal Majapahit yang masih belum Muslim. (Marwati Djoened Poeponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jil III,* Balai Pustaka Jakarta 1991, hal 284-286).

Membangun masjid adalah perkara sakral. Namun, dalam prosesnya ada yang mutlak harus tunduk pada aturan Islam, seperti arah kiblat dan fungsi masjid sebagai tempat ibadah (terutama shalat berjamaah). Sisanya ada perkara yang tidak ada kaitan dengan masalah akidah dan ibadah, seperti gaya, bahan-bahan bangunan, proses pengerjaan, dan sebagainya. Diduga, Raden Sepat adalah arsitek terbaik pada zamannya. Para Wali ingin mempersembahkan yang terbaik saat membangun masjid yang akan digunakan sebagai pusat kegiatan umat Islam. Oleh karena itu, untuk perkara-perkara teknis yang tidak terkait mengganggu akidah umat Islam, mereka tidak segan-segan bekerja sama dengan Raden Sepat, sekalipun bukan Muslim.

Perhargaan terhadap kebudayaan lokal—yang ditunjukkan dengan memilih gaya lokal dalam membangun masjid—diduga sebagai upaya dakwah kepada masyarakat di Jawa saat itu agar mereka bisa memahami bahwa Islam bukan hendak menghilangkan budaya Jawa, melainkan ingin menyempurnakannya dengan ajaran Islam yang luhur. Padahal, bila dilihat dari sisi kultural yang lain, para Wali ini sebagian besar masih berketurunan Arab. Hanya Sunan Kalijaga yang dikenal asli berdarah Jawa. Akan tetapi, ketika memilih unsur kebudayaan untuk berdakwah, yang dipilih adalah yang paling dikenal oleh masyarakatnya, yaitu kebudayaan Jawa, bukan Arab.

Bila dalam masalah yang tidak terkait langsung dengan akidah, para Wali ini bisa amat toleran, lain halnya bila sudah menyangkut masalah akidah. Ini dapat kita lihat pada kasus Syekh Siti Jenar (Syekh Lemah Abang) yang dihukum mati oleh Kerajaan Demak atas rekomendasi dari para wali. Belakangan ini ada yang mencoba membalikkan fakta bahwa Syekh Siti Jenar dihukum karena alasan politik bahwa ia tidak mendukung penguasa Demak. Padahal, dalam berbagai cerita yang dimuat dalam berbagai babad, proses pelaksanaan hukuman setelah benar-benar secara faktual Syekh Siti Jenar melakukan penyimpangan agama.

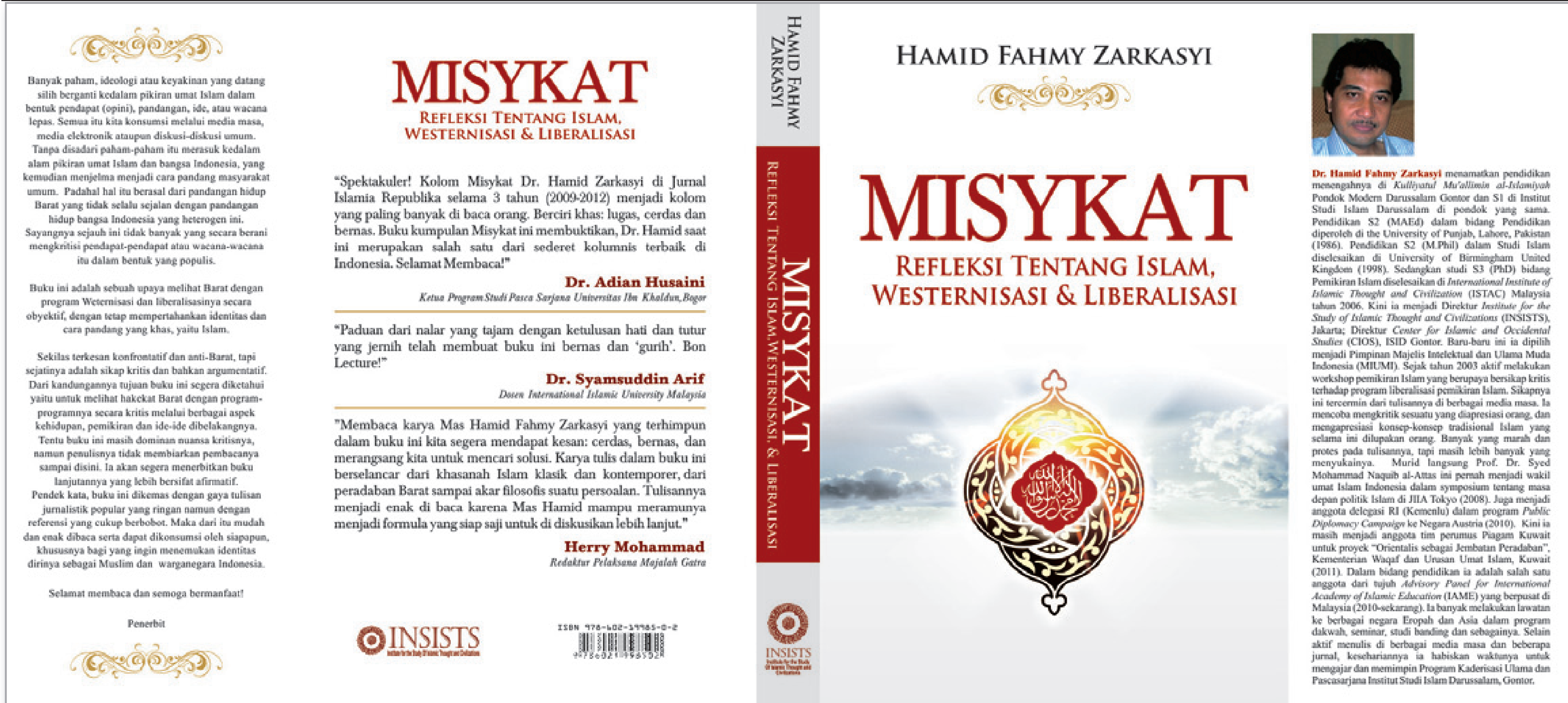
Paling tidak, dalam dua sumber babad, yaitu *Babad Tanah Jawi* dan *Babad Walisana*, eksekusi mati yang dilakukan terhadap Syekh Siti Jenar setelah terbukti secara meyakinkan bahwa Syekh Siti Jenar melakukan hal-hal berikut. Pertama, Syekh Siti Jenar telah meninggalkan alquran, hadis, *ijma'*, dan *qiyâ*. Kedua, Syekh Siti Jenar telah terkategori zindik dan *mulhid* (panteis dan ateis) karena mengaku bahwa *ora ana Pangeran anging Angsun* (tidak ada Tuhan kecuali Aku). Ketiga, Syekh Siti Jenar sering menakwilkan alquran tanpa kaidah yang benar sehingga banyak yang takwilnya yang *ngawur*. Keempat, ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar sangat membahayakan karena sangat pesimistis melihat dunia juga mendukung tindakan anarki dan *chaos*. Dan kelima, perilaku-perilaku muridnya pun sangat meresahkan masyarakat.

Para Wali tidak menjatuhkan keputusan sepihak. Sebelumnya, telah dilakukan berkali-kali diskusi. Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus yang ditugaskan untuk mengajak kembali Syekh Siti Jenar ke jalan yang benar. Namun, hasilnya tetap nihil. Akhirnya, suatu musyawarah Walisongo diadakan di bawah pimpinan Sunan Giri sebagai tetua Walisongo. Dalam musyawarah yang mirip dengan persidangan itu, Syekh Siti Jenar tetap pada pendiriannya hingga ia akhirnya diputuskan telah menyimpang dan layak untuk dijatuhi hukuman karena bila dibiarkan malah akan merusak akidah umat Islam.

Dalam hal ini berlaku prinsip kaidah fikih *sadd adz-dzarî'ah* (mencegah bahaya yang lebih besar).

Setelah Walisongo mendirikan Kerajaan (Islam) Demak, Syekh Siti Jenar dipanggil kembali untuk diperiksa ulang mengenai pendapat dan praktik keagamaannya. Karena tidak ada perubahan maka diputuskan oleh kerajaan bahwa Syekh Siti Jenar harus dijatuhi hukuman mati bersama dengan tujuh orang muridnya. (Widji Saksono, *Mengislamkan Tanah Jawa*, 1995:46-66). Demikianlah contoh "toleransi" Walisongo! *Wallâhu a'lam bish-shawab.* ■

ISLAMIA
JURNAL PEMIKIRAN ISLAM REPUBLIKA

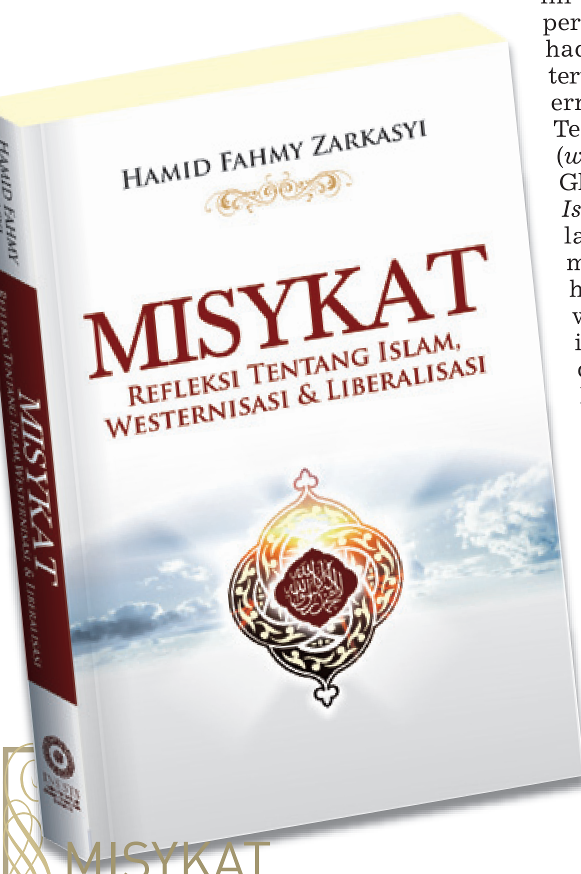


TELAAH KITAB

Judul	: Misykat — Refleksi tentang Islam, Westernisasi, dan Liberalisasi
Penulis	: Hamid Fahmy Zarkasyi
Penerbit	: *Institute for The Study of Islamic Thought and Civilizations* (INSISTS)
Tahun	: Maret, 2012
Tebal	: 320 halaman

Misykat: Relung Cahaya Intelektual Islam

Lugas, cerdas, dan Bernas! Itulah kata-kata yang paling pas untuk menggambarkan isi buku yang ditulis oleh Dr Hamid Fahmy Zarkasyi, M Phil ini. Hamid Fahmy adalah Direktur *Institute for The Study of Islamic Thought and Civilizations* (INSISTS), Direktur *Center for Islamic and Occidental Studies* (CIOS), Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Pemimpin Redaksi Jurnal Ilmiah Islamia, dan banyak jabatan lainnya. Beliau juga adalah putra pendiri pondok pesantren modern Gontor.



Kurang lebih seribu tahun lalu, *hujjatul Islam* Imam Abu Hamid al-Ghazali menulis sebuah buku berjudul *Misykat al-Anwar*, salah satu buku *magnum opus*-nya di bidang tasawauf. Alih-alih menyentuh soal tasawuf, buku dengan judul sama, yaitu *Misykat*, karya Hamid Fahmy ini mencoba menyerukan perlawanan intelektual terhadap pemikiran Barat, terutama menyangkut westernisasi dan liberalisasi. Tentu dari sudut pandang (*worldview*) Islam. Jika al-Ghazali diberi gelar *hujjatul Islam* (pembela ajaran Islam karena hujah/argumen-argu-mennya) di hadapan para filosof yang waktu itu merusak keimanan kaum Muslim, tidak salah kalau Hamid Fahmy digelari *hujjatul Islam* abad modern di hadapan para intelektual Barat. Hamid Fahmy boleh disebut sebagai *magister secundus* (guru kedua) yang menghidupkan ajaran al-Ghazali, yaitu budaya mengkritisi ide-ide yang asing bagi Islam dengan senjata ilmu dan intelektualitasnya.

Mau tidak mau, suka tidak suka, kita sekarang ini hidup di zaman peradaban Barat yang menguasai dunia. Peradaban yang berdiri di atas landasan paham sekularisme, rasionalisme, utilitarianisme, dan materialisme tengah menghegemoni peradaban lain termasuk peradaban Islam. Tidak menutup mata berbagai keberhasilan dan kemajuan—terutama di bidang sains dan teknologi, dihasilkan oleh peradaban ini. Namun, juga tidak dapat dipungkiri, peradaban Barat juga telah menghasilkan penjajahan, perang berkepanjangan, ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, keterasingan (*alienasi*), dan *anomie* (berkurangnya adat sosial atau standar etika dalam diri individu atau masyarakat).

Banyak buku yang mengkritik dan menunjukkan kerusakan dunia sebagai ekses dari "keberhasilan" Barat menguasai dunia saat ini. Kata sejarawan Marvin Perry, peradaban Barat adalah sebuah peradaban besar, tetapi sekaligus sebuah drama yang tragis (*a tragic drama*). Peradaban ini penuh kontradiksi. Satu sisi, ia memberi sumbangan besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang membuat berbagai kemudahan fasilitas hidup, tapi pada sisi lain peradaban ini memberi kontribusi yang tidak kecil kepada penghancuran alam semesta. (Marvin Perry, *Western Civilization : A Brief History*, Boston - New York : Houghton Mifflin Company, 1997).

Harun Yahya dalam bukunya *The Disasters Darwinism Brought to Humanity* menggambarkan berbagai bencana kemanusiaan yang ditimbulkan akibat Darwinisme, di antaranya, berupa rasisme, penjajahan, dan kolonialisme. Ribuan bahkan jutaan nyawa manusia melayang. Perbudakan terjadi dan kekayaan alam dieksploitasi.

Hegemoni peradaban Barat telah melahirkan klaim-klaim kebenaran versi mereka. Klaim ini melahirkan "inkuisisi" (*inquisition*) model baru atas nama perang melawan terorisme. Inkuisisi abad ke-21 ini lingkupnya jauh lebih luas, global, dan tidak lagi mengenal batas-batas geografis serta menggunakan alat-alat yang sangat canggih dan memusnahkan secara masif dan massal. Dari pengejaran, penginterogasian, penyiksaan, dan pengingkaran hak-hak asasi orang per orang atau kelompok yang "diduga" berseberangan atau berkeyakinan "beda", sampai pembumihangusan negara-negara berdaulat, seperti yang menimpa Afghanistan dan Irak.

Hamid Fahmy adalah salah satu intelektual dan ulama muda yang gigih memberikan kritik dan perlawanan terhadap hegemoni pemikiran Barat, dan pada saat yang sama menawarkan konsep-konsep Islam bagi kehidupan. Dengan latar belakang dan pendidikan yang meliputi dua peradaban (S1 di ISID Gontor, S2 di University of Punjab Pakistan dan University of Birmingham Inggris, S3 di ISTAC Malaysia), Hamid Fahmy mampu melakukan kritik secara komprehensif. Uniknya, kritik terhadap peradaban Barat terutama dalam kajian dewesternisasi dan deliberalisasi, dilakukannya dengan tulisan-tulisan ringan, renyah, segar, namun padat berisi. Hanya dengan sindiran-sindiran dan komentar ringan, Hamid Fahmy menghentak pemikiran kita untuk ikut pula mengkritisi pemikiran Barat.

Buku ini adalah kumpulan tulisan Hamid Fahmy di kolom "Jurnal Islamia" *Republika* dengan judul yang sama, yaitu *Misykat*. Kolom yang senantiasa ditunggu dan dinikmati para pembaca "Islamia" (baik versi koran, jurnal Islam, maupun kolom-kolom di media lain) dikumpulkan dalam sebuah buku dengan tatanan dan struktur yang rapi. Isinya tentang dua hal besar, yaitu kritik Islam terhadap westernisasi dan liberalisasi. Meskipun, bukan tulisan baru dan kita sudah pernah membacanya di kolom tersebut, tetap saja buku ini enak dibaca. Seperti, seorang anak kecil yang senang melahap kue kesukaannya, ketika dihidangkan kembali kue yang sama, tetap saja dia menyantapnya dengan lahap.

Cholis Akbar, Redaktur Pelaksana *Hidayatullah.com* bahkan membandingkan tulisan Hamid Fahmy yang berkelas ini dengan kolom Goenawan Muhammad di majalah *Tempo*. Simaklah penuturannya, "Ketika awal menjadi mahasiswa, tahun 90-an, saya orang yang rajin mengumpulkan uang hanya untuk bisa membeli buku *Catatan Pinggir* Mas Gun (Goenawan Muhammad, mantan pimred majalah *Tempo*). Dalam tulisannya yang meliuk-liuk, ibarat seni beladiri kung fu ini saya hanya mendapatkan informasi, bukan yang lain. Membaca *Misykat* karya Hamid Fahmy Zarkasy ini saya tidak hanya mendapatkan informasi, namun juga mendapatkan ilmu dan meneguhkan keyakinan. Dr Hamid membuktikan, ia kini adalah salah satu kolumnis terbaik Indonesia." ■ budi handrianto

MISYKAT

Umat



Dr Hamid Fahmy Zarkasyi
Direktur INSISTS

"Ummati ... ummati ... ummati" itulah di antara desah terakhir dari Nabi terakhir itu. Nabi Muhammad SAW seperti sedang meneguhkan misinya. Ia bukan penguasa yang egois dan tiranik. Sumpah serapah Edward Gibbon (1737-1794) bahwa Muhammad adalah pembohong dan akhir hayatnya cenderung pada seksualitas dan individualistis adalah sampah. Nabi tidak menyebut "rakyatku ... rakyatku ...." atau "hartaku ... hartaku... " Padahal, Nabi adalah seorang kepala dari sebuah negara yang baru lahir.

Nabi Muhammad bukan raja yang ketika ajal sudah mempersiapkan pewaris. Bukan pula diktator yang setelah meninggal menuai hujatan dan pengadilan. Nabi terakhir itu bersih. Ia tulus ikhlas memikirkan keselamatan umatnya.

Hujatan Norman Daniel, (*Islam and the West*), Alexander Ross (*The Prophet of Turk and Author of the al-Coran,* 1653), Humphrey Preideaux (*The Life of Muhammad*, 1679) juga *nonsense*. Kata mereka bahwa Nabi terakhir itu "tokoh penipu yang cerdik dan munafik" tidak terbukti. Tidak satu pun sahabat yang merasa tertipu. Dan, tidak satu pun dari umatnya yang merasa dibohongi.

Lalu, apa pentingnya umat bagi seorang Nabi yang juga kepala negara Islam itu?

Kata umat bukan hanya keluar dari bibir Nabi. Alquran menyebut kata itu sebanyak kurang lebih 70 kali. Itu pun bukan hanya umat Nabi terakhir, tapi juga umat nabi-nabi terdahulu. Maka, ketika Nabi menyebut "umatku", orang mestinya paham di sana ada kelompok yang "bukan" umatnya.

Memang, umat bukan hanya pengikut nabi-nabi. Dalam Alquran banyak ayat yang begitu. Dalam surah al-Jathiyah 28 kata "setiap umat" berarti sangat umum. Bahkan, dalam al-Araf 38 dan al-Ankabut 18, umat dilabelkan kepada jin dan manusia yang masuk ke neraka. Dan, masih banyak lagi makna-makna yang tidak selalu religius.

Maka, tidak salah jika para ulama dari abad 2 - 6 H beda pendapat tentang makna umat. Al-Laith Ibn Sa'ad (w.175 H) mengkaitkan umat dengan kaum nabi-nabi. Abu Ja'far al-Tabari (w 310 H) memaknainya sebagai sekelompok manusia yang terkait pada satu mazhab atau agama. Tapi al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi (w.175 H) menambahkan terkait dalam arti ingkar atau taat.

Hanya al-Raghib al-Isfahani (w. 502 H) memperluas maknanya tidak hanya terkait sepenuhnya dengan agama. Umat baginya adalah setiap kumpulan yang bersatu baik pada satu masalah, satu agama, satu zaman tertentu, ataupun tempat tertentu, baik itu alami atau direkayasa.

Al-Raghib lalu diikuti oleh pakar bahasa. Dalam tradisi ilmu bahasa Arab "ummah" memiliki sepuluh makna: asal sesuatu atau tempat rujukan, *jama'ah* (kumpulan), jalan atau agama, keadaan, orang yang beragama secara benar, tujuan, kerabat, bangunan, zaman, dan buta huruf.

Dari perbedaan pendapat ini, E W Lane, dalam karyanya *Arabic-English Lexicon*, meringkas makna umat menjadi dua makna. Pertama, orang-orang, masyarakat, suku, kaum keluarga/kerabat, atau partai. Kedua, masyarakat dari agama tertentu, masyarakat yang menerima utusan nabi-nabi, orang-orang beriman dan tidak beriman. TB Irving seorang professor Muslim Amerika secara singkat memaknai *ummah* dengan pengertian komunitas atau bangsa.

Dalam kaitannya dengan agama, makna *ummah* bersentuhan dengan kata "imam", seorang yang diikuti dan dirujuk dalam berbagai hal (al-marja'). Di sini makna *ummah* bersentuhan lagi dengan konsep *din* yang berarti jalan, keyakinan dan ketaatan. Dari sisi agama inilah Ibn Fariz (pakar bahasa Arab) bersikukuh *ummah* adalah orang-orang yang berada dalam agama yang benar. Sedikit agak lunak, Ibn Manzur memahami *ummah* sebagai sekelompok orang yang bertujuan satu. Maka, tidak salah kalau HAR Gibb memaknai umat sebagai bagian dari konsep politik.

Terlepas dari makna-makna itu yang pasti maksud desah Nabi "ummati ... ummati... " adalah apa yang disimpulkan Ibn Faris. Kalau kita rujuk al-Baqarah 143 dan Ali Imran 110 "umatku" yang dimaksud Nabi adalah umat penengah (*ummah wasathan*) dan umat terbaik (*khaira ummah*).

Lalu apa arti umat terbaik itu?

Bagi Sayyid Qutub artinya lebih dibanding umat lain. Karena lebih maka bisa memberi, memberi yang tidak dimiliki umat lain. Memberi akidah yang benar, konsep, aturan dan ilmu pengetahuan yang benar, serta akhlak yang baik kepada umat manusia. Itulah makna rahmat bagi alam semesta. Buku *Mu'jam al-Mufahras li Alfadh al-Qur'an* bahkan memerinci bahwa kata *khair* yang berarti kelebihan (*afdhaliyyhah*) dan keunggulan (*al-tafawwuq*) terdapat pada 89 tempat.

Keunggulan umat ini juga besumber dari keunggulan nabinya. Banyak keutamaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad dibanding nabi-nabi lain sebelumnya. Di antara keunggulan itu dalam haidis riwayat Jabir ibn Abdillah bahwa misi Nabi bukan hanya untuk orang Arab, tapi untuk seluruh umat manusia. Nabi juga dikaruniai haknya memberi syafaat.

Kriteria umat terbaik bukan hanya sekadar berbaik-baik kepada umat lain. Umat yang terbaik menurut Alquran adalah yang menyuruh kebaikan (baik menurut akal dan wahyu), mencegah kejahatan dan beriman kepada Allah.

Umat terbaik adalah yang menjaga kehidupan umat manusia dari kerusakan (*mafsadah*) berarti mengedepankan kebaikan (*maslahah*). Kebaikan, dalam rumusan al-Syatibi ada lima: baik untuk menjaga harta (*mal*), akal (*aql*), jiwa (*nafs*), keturunan (*nasal*) dan agama (*din*) manusia.

Jadi, umat terbaik mestinya bisa menjaga kelima kebaikan asasi manusia. Umat Islam tidak perlu diajari doktrin HAM, kesetaraan gender, persamaan hak, berdemokrasi, melindungi anak-anak, perempuan. Konsep maslahat itu sudah cukup unggul dibanding konsep HAM dan lainnya.

Untuk menjadi umat terbaik tentu ada syaratnya. Abd al-Kabir al-Humaidi, dalam *Mafhum al-Ummah*, merumuskan dua syarat: amanah dan kekuatan. Amanah mengharuskan sikap kejujuran, keikhlasan, ketakwaan dan istikamah, akidah , ibadah, dan akhlak yang sahih. Dengan sifat ini hubungan sosial umat Islam (*mu'amalat*) menjadi lebih unggul dari umat yang lain. Quwwah (kekuatan), berarti umat Islam harus memiliki kekuatan materi, pemikiran, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan peradaban.

Dari makna filologis *ummah* dan dari konsep *khayra ummah* kita bisa mamahami desah terakhir Nabi "ummati ... ummati". Kalau itu doa berarti mohon umatku selamat dunia akhirat. Jika itu kegundahan berarti itu peringatan "awas hati-hati jaga akidah dan syariahmu wahai umatku". Dan, jika itu harapan bermakna pesan "jadilah umat terbaik dengan amanah *quwwah*". *Wallahu a'lam* ■